



**Penerapan Core Value Berakhlak Asn Dalam Konsepsi Nilai-Nilai
Etika Administrasi Publik**

Wuri Handayani¹, Dina Suryawati², Hermanto Rohman³

^{1,2,3} Universitas Jember, Jember, Indonesia

dinasuryawati@unej.ac.id

Article Info

Article History

Received:

10-08-2024

Revised:

20-10-2024

Accepted:

20-11-2024

Abstract: *This article aims to describe the application of the core value of BerAKHLAK ASN in the conception of ethical values of public administration at the East Java Provincial Government and Development Regional Coordinating Agency in Jember (Bakorwil) V Jember. Bakorwil V Jember implements the ASN core value of having morals in accordance with the Circular Letter of the Governor of East Java Number 800/1456/031.2/2022, the aim of which is as a basic value and work culture for ASN in East Java. The core value of BerAKHLAK is a program that contains a series of basic values guidelines and a code of ethics for ASN that are uniform nationally in accordance with the Circular Letter of the Ministry of Empowerment of State Apparatus Bureaucratic Reform (MenPAN RB) Number 20 of 2021. The implementation of the core value of BerAKHLAK for ASN is assessed using indicators of ethical values Widodo's public administration which includes 7 indicators, namely efficiency value, value of distinguishing between personal and office property, impersonal value, crystal system value, responsible value, accountability value and responsiveness value. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of the research show that from the application of the ASN BerAKHLAK core values, five public administration ethical values were found, namely the values of efficiency, impersonal, ethical system, responsibility, accountability and responsiveness. This shows that the implementation of the core value of BerAKHLAK ASN in Bakorwil V Jember is in accordance with the ethical values of public administration even though it does not include all values.*

Keywords: *Policy Implementation, Implementation of Core Value BerAKHLAK, Public Administration Ethics*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN

harus menjunjung tinggi standar etika dan mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Implementasi etika dalam sektor publik sangatlah penting karena etika akan menjadi kontrol bagi penyelenggaraan negara. Menurut (Pasolog, 2007), etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau *right rule of conduct* (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Etika administrasi publik menjadi hal mendasar untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, namun dalam kenyataannya etika administrasi publik menjadi hal yang masih luput untuk dikaji. Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selama tahun 2022 terdapat 1.840 pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Sementara itu per Desember 2022 tercatat 97 instansi pemerintah belum memiliki Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku (NKK).

Hal ini menunjukkan bahwa etika yang dimiliki ASN masih tergolong rendah. Sejalan dengan hal ini pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi (Menteri PANRB) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Value* BerAKHLAK dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. *Core value* BerAKHLAK merupakan pengerucutan serta penggabungan nilai-nilai etika ASN secara nasional dari berbagai instansi pemerintah. Sesuai arahan dari Kepala Lembaga

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) *core value* BerAKHLAK harus diterapkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu instansi pemerintah daerah yang sudah menerapkan *core value* BerAKHLAK adalah Bakorwil V Jember. Penerapan *core value* BerAKHLAK di Bakorwil V Jember sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1456/031.2/2022 Tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti penerapan *core value* BerAKHLAK di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember (Bakorwil) V Jember masih belum maksimal. Masih dijumpai perilaku ASN yang belum sesuai dengan nilai etika administrasi publik. Beberapa dari ASN di Bakorwil V Jember masih sering bolos saat jam kantor, datang terlambat dan melaksanakan tugas tidak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa etika yang dimiliki ASN di Bakorwil V Jember masih tergolong rendah, oleh karena itu diperlukan nilai-nilai etika administrasi publik yang diterjemahkan melalui *core value* BerAKHLAK ASN. Berdasarkan teori (Widodo, 2001) terdapat tujuh nilai etika administrasi publik yang dapat menjadi acuan bagi ASN. Nilai tersebut yaitu; nilai efisiensi, nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor, nilai impersonal, nilai *merytal system*, nilai responsibel, nilai akuntabilitas dan nilai responsivitas. terhadap *core value* BerAKHLAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

penerapan *core value* BerAKHLAK ASN dalam konsepsi nilai-nilai etika administrasi publik di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember (Bakorwil) V Jember. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan terkait penerapan *core value* BerAKHLAK ASN dan nilai etika administrasi publik serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan konsep maupun objek yang sama dengan peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut (Ibrahim, 2007), administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2014), yang menyatakan bahwa administrasi publik sebagai proses sumber daya serta anggota publik dikoordinasikan untuk selanjutnya diformulasikan, mengimpelementasikan dan mengolah keputusan publik dengan seni serta ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs*.

Etika Administrasi Publik

Menurut (Pasolog, 2007), etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau *right rules of conduct* (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya

dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat (Chandler dan Plano), yang menyatakan bahwa Etika administrasi publik adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku moral suatu organisasi atau profesi manajemen.

Nilai-Nilai Etika Administrasi Publik

Menurut (Widodo, 2001), nilai etika administrasi publik sebagai berikut; (a) nilai efisiensi, mereka akan menggunakan dana publik secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik Darwin (1995). (b) nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor. Sebagai seorang administrator yang baik tidak boleh menggunakan fasilitas yang diberikan kantor untuk kepentingan pribadi; (c) nilai impersonal. Dalam hubungan kerja suatu organisasi hendaknya menggunakan hubungan yang impersonal atau secara formal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan daripada unsur rasional dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dari organisasi; (d) nilai *merytal system*. nilai *merytal sytem* berkaitan dengan *recrutemen* dan *promotion*. Dengan *merytal system* pegawai yang berada di suatu organisasi atau instansi merupakan orang yang profesional; (e) Nilai responsibel. Nilai responsibel berkaitan dengan komitmen serta tanggungjawab administrator publik terhadap tugas dan kewenangannya. Responsibilitas menurut Friedrich dalam Darwin (1996), merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator dalam menjalankan

tugasnya. (f) nilai akuntabilitas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen dari pengelolaan sumber daya yang dipercayakan baik secara vertikal maupun horizontal (Endahwati, 2014). (g) nilai responsivitas, nilai responsivitas, merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi aspirasi baru, tuntutan baru dan pengembangan baru sehingga birokrasi dapat merespon cepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Sugiandi dalam Herdini & Widiyarta, (2020). Namun De Graaf (2014), berpendapat lain terkait nilai etika administrasi publik. Menurut De Graaf ada sepuluh nilai etika administrasi publik yaitu; (a) kepentingan umum; (b) akuntabilitas; (c) transparansi; (d) keterbukaan; (e) keadilan; (f) kewajaran; (g) keberanian; (h) konsistensi; (i) integritas; (j) kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan nilai-nilai etika administrasi publik menurut Widodo (2001) untuk menjadi konsep dalam melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan *core value* BerAKHLAK ASN. Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan *core value* BerAKHLAK dalam konsepsi nilai-nilai etika administrasi publik. Informan dalam penelitian ini yaitu ASN di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di

Jember (Bakorwil) V Jember yang berjumlah 5 pegawai. Selanjutnya uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tringulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan analisis model interaktif (Miles, Hubermas dan Saldana, 2014), yaitu menganalisis dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Penerapan *Core Value* BerAKHLAK ASN di Bakorwil V Jember

Penerapan *core value* BerAKHLAK ASN di Bakorwil V Jember sesuai dengan nilai-nilai dari *core value* BerAKHLAK, hal ini terus dijalankan secara mengalir dan menjadi fondasi budaya kerja baru bagi ASN dalam melaksanakan tugas di Bakorwil V Jember. Wujud penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

Merujuk pada buku panduan BerAKHLAK dan Surat Edaran MenPAN RB Nomor 20 Tahun 2021, nilai berorientasi pelayanan mengacu pada perilaku memahami serta memenuhi kebutuhan sesuai dengan SOP yang ada. Nilai ini dijalankan di Bakorwil V Jember melalui pemberian pelayanan oleh ASN kepada OPD, mitra dan masyarakat. sudah diterapkan di Bakorwil V Jember sebagai bentuk penerapan

core value BerAKHLAK.

b. Akuntabel

Dalam melaksanakan tugas ASN harus cermat serta bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Perilaku akuntabel berdasarkan Surat Edaran MenPAN RB diterjemahkan melalui perilaku yang jujur, bertanggungjawab, serta menggunakan kekayaan milik negara dengan efektif dan efisien. Wujud penerapan nilai akuntabel di Bakorwil V Jember dapat dilihat dari realisasi kerja ASN di Bakorwil V Jember melalui LKJIP dan Rencana Kerja Triwulan III.

c. Kompeten

Merujuk pada buku panduan BerAKHLAK, kompeten yakni ASN konsisten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Dalam menerapkan nilai kompeten di Bakorwil V Jember diwujudkan dengan ASN terus belajar meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik secara *online* maupun *offline*.

d. Harmonis

Nilai harmonis ASN harus solid dimana ASN saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Wujud dari nilai harmonis di Bakorwil V Jember ini seluruh ASN di semua bidang bekerja sama dan saling membantu tanpa membedakan status dan ras, ASN juga saling asuh satu sama lain.

e. Loyal

Nilai loyal yang ditekankan dalam BerAKHLAK sesuai dengan

buku panduan BerAKHLAK yakni ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ASN harus menjaga nama baik pimpinan, instansi dan negara. Nilai loyal di Bakorwil V Jember diwujudkan dengan adanya *reward* dan *punishment* serta rasa cinta terhadap negara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan Pancasila.

f. Adaptif

Merujuk pada buku panduan BerAKHLAK serta Surat Edaran MenPAN RB perilaku adaptif yakni ASN siap dan mampu untuk terus berinovasi serta antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang ada. Nilai adaptif yang ditemukan yaitu ASN di Bakorwil V Jember menerapkan kerja cerdas dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem.

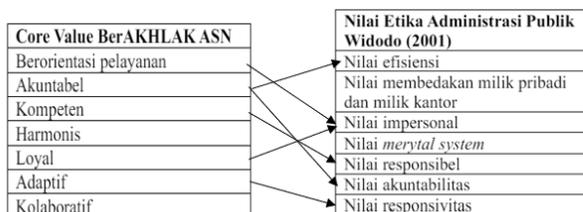
g. Kolaboratif

Nilai kolaboratif yang ditekankan pada penerapan BerAKHLAK ialah ASN harus bahu membahu bekerja sama untuk menggapai kemajuan yang merupakan tujuan bersama instansi dengan memberikan kesempatan semua pihak untuk berkontribusi dan memanfaatkan SDM yang ada. Nilai yang ditemukan yaitu ASN di Bakorwil V Jember melakukan kolaborasi dengan organisasi dan *stakeholder* lain diluar Bakorwil V Jember.

Penerapan Core Value BerAKHLAK ASN di Bakorwil V Jember dalam Dimensi Etika Administrasi Publik

Dari penerapan core value

BerAKHLAK ASN jika dibandingkan dengan nilai-nilai etika administrasi publik terdapat konsepsi diantara keduanya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 1. Analisis nilai *core value* BerAKHLAK dan nilai etika administrasi publik (Widodo, 2001).

Sumber: Analisis peneliti

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat lima nilai etika administrasi publik dalam penerapan *core value* BerAKHLAK ASN. Nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor serta nilai *merytal system* tidak dipakai karena tidak sesuai dengan *core value* BerAKHLAK ASN.

- a. Penerapan *core value* BerAKHLAK pada dimensi Berorientasi Pelayanan jika dikaitkan dengan nilai etika administrasi terdapat konsepsi dengan nilai impersonal. Berorientasi pelayanan artinya terdapat hubungan antar sesama dimana dalam memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan jabatan dan sebagainya. Nilai ini relevan dengan nilai impersonal yang juga menekankan bahwa dalam hubungan organisasi tidak memandang status, semua orang mendapatkan hak yang sama.
- b. Dalam penerapan nilai akuntabel *core value* BerAKHLAK terdapat konsepsi dengan nilai etika administrasi publik yakni nilai efisiensi dan nilai akuntabilitas.

Efisiensi merupakan bagian dari akuntabel dimana salah satu ciri dari akuntabel yaitu efisien. Sedangkan nilai akuntabilitas merupakan bentuk dari akuntabel kinerja birokrasi publik. Kedua nilai ini diwujudkan dalam *core value* BerAKHLAK melalui dokumen LKJIP serta realisasi anggaran HUT Provinsi Jawa Timur di Bakorwil V Jember.

- c. Penerapan *core value* BerAKHLAK pada dimensi kompeten jika dikaitkan dengan nilai etika administrasi publik ada keterkaitan dengan nilai bertanggung jawab. Kedua nilai ini menekankan bahwa birokrasi publik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki. Nilai ini diwujudkan melalui adanya Triwulan III ASN Bakorwil V Jember.
- d. Dalam penerapan *core value* BerAKHLAK harmonis belum ada konsepsi dengan nilai etika administrasi publik. Hal ini dikarenakan harmonis mengarah pada sikap menghargai setiap ASN tanpa memandang latar belakangnya. Nilai ini kurang relevan jika dikaitkan dengan nilai etika administrasi publik.
- e. Penerapan nilai loyal dalam *core value* BerAKHLAK jika dikaitkan dengan nilai etika administrasi publik ada konsepsi yaitu nilai impersonal. Kedua nilai ini mengarah pada sikap ASN yang bekerjasama dalam wadah

organisasi didasarkan pada hubungan formal atas nama negara bukan berdasarkan hubungan pribadi ASN. Dalam penerapannya nilai ini diwujudkan melalui adanya *reward* dan *punishment* sebagai bentuk loyal terhadap instansi.

- f. Penerapan nilai *core value* BerAKHLAK adaptif jika dikaitkan dengan nilai etika administrasi publik ada konsepsi dengan nilai responsivitas, dimana kedua nilai memiliki kesamaan yaitu ASN harus inovatif dan tanggap dalam menghadapi tantangan baru serta aspirasi baru agar tidak tertinggal. Nilai ini diwujudkan melalui adanya penyediaan *barcode* dan penggunaan aplikasi persuratan *online*.
- g. Dalam penerapan nilai kolaboratif *core value* BerAKHLAK jika dikaitkan dengan nilai etika administrasi publik belum ada konsepsi. Nilai kolaboratif mengarah pada sikap memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, nilai ini kurang relevan dengan nilai etika administrasi publik.

KESIMPULAN

Penerapan *core value* BerAKHLAK, di Bakorwil V Jember sudah dijalankan dengan baik. *Core value* BerAKHLAK menjadi budaya kerja baru di Bakorwil V Jember, hal ini dibuktikan dengan setiap kinerja ASN berpedoman pada nilai-nilai *core value* BerAKHLAK. Setelah adanya *core value* BerAKHLAK, ASN di Bakorwil V Jember menjadi lebih bertanggungjawab akan tugasnya

sebagai ASN. Namun tidak semua nilai berhasil diterapkan seperti nilai kompeten *core value* BerAKHLAK belum bisa diterapkan dengan baik karena masih banyak ASN yang kurang paham akan nilai ini. Nilai etika administrasi publik di Bakorwil V Jember dijalankan dan diwujudkan melalui *core value* BerAKHLAK. Dari penerapan *core value* BerAKHLAK ASN hanya ditemukan lima nilai etika administrasi publik yaitu; nilai impersonal sejalan dengan nilai berorientasi pelayanan dan loyal, nilai efisiensi dan nilai akuntabilitas sejalan dengan nilai akuntabel, nilai *responsible* sejalan dengan nilai kompeten, dan nilai adaptif sejalan dengan nilai kolaboratif. Nilai etika administrasi publik membedakan milik pribadi dan milik kantor dan nilai *merytal system* tidak dipakai karena tidak relevan dengan nilai *core value* BerAKHLAK ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. (2017). Urgensi Etika Dalam Tata-Kelola Pemerintahan (Governance). *Jurnal Inovasi Sektor Publik, Volume 1*, 79-83.
- Annisa Ayu Dira, A. K. (2020, Vol 2). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Teamwork Terhadap Kinerja Pegawai (Studi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis). *Bussines Management And Entrepreneurship* , 150.
- Eko, P. (2017). Takziyatun NAFS : Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 20.
- Fajar Nurdiansyah, H. S. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi

- Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam Volume 2*, 159.
- Gesi, B. d. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen Volume 3*, 53.
- Habudin. (2020). Budaya Organisasi. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 24-25.
- Holilah. (2013). Etika Administrasi Publik. *Jurnal Review Publik*, 233-245.
- Jalismen, M. (t.thn.). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Etika Terhadap Organization Citizenship Behavior(OCB) Guru SMA Negeri Di Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1009-1010.
- Kurniawan Candra Guzman, N. O. (2018). Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 307-308.
- Kurniawan, M. C. (2021). *Etika Administrasi Publik*. Malang : Intrans Publishing.
- M. Chazienul Ulum, L. J. (2021). *Etika Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Markus, M. J. (t.thn.). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik Volume 4*, 6-7.
- Marliani, L. (t.thn.). Metamorfosis Administrasi Negara. 1-2.
- Nawawi, Z. (2018). Ethics Of Public Administration In The Administration Of Governance In Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan Volume 1*, 2-3.
- Nuraeni, S. (t.thn.). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. 2-6.
- Podungge, R. (t.thn.). Mewujudkan Birokrasi Yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik. 3-4.
- Pramesti, M. W. (2018). Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam Volume 1. *Jurnal Politea*, 39-41.
- Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Ciracas, Jakarta: Erlangga.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pujanarko, M. (2018). Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulis Berita Di Media Online. *Jurnal Citra Volume 6*, 3.
- Rasdiana, R. R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik Volume XVII*, 256.
- Rasdiana, R. R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik Volume XVII (2)*, 254.
- Robby Fauji, L. R. (2022). Strategi Bauran Pemasaran Usaha Ikan Bandeng Desa Tanjung Pakis Di Masa Pandemi Universitas Buana Perjuangan Karawang. 1160-1161.
- Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologis: Literature Review . *Jurnal Pembangunan*

Ekonomi dan Keuangan Daerah
Volume 23, 16-17.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukri J, M. I. (2017). Penerapan Etika Administrasi Negara Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Di

Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 3, 113-116.